

OMBUDSMAN KALBAR BUKA SMS PENGADUAN MASALAH PPDB TAHUN AJARAN 2018/2019, INI NOMORNYA

Senin, 25 Juni 2018 - Muhammad Rhida Rachmatullah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat membuka Pos Pengaduan melalui SMS Center di nomor 0816-383-245 untuk mempermudah masyarakat dalam penyampaian laporan terkait permasalahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2018/2019.

Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalbar, Â Agus Priyadi mengatakan Pos Pengaduan SMS Center itu bertujuan untuk Â menampung dan menyelesaikan permasalahan yang dialami masyarakat terkait PPDB.

"SMS Center itu untuk mempermudah pelaporan," ungkapnyanya kepada Tribun Pontianak, Senin (25/6/2018).

Agus menimpali Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan lakukan pengawasan pada beberapa Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sederajat di Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya.

"Pengawasan dilakukan kepada sekolah-sekolah yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Kementerian Agama RI. Ombudsman juga membuka Pos Pengaduan PPDB Tahun Ajaran 2018/2019," terangnya.

Agus mengimbau masyarakat agar melapor jika dalam pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2018/2019 terdapat indikasi maladminstrasi dan/atau penyimpangan kepada Ombudsman RI Perwakilan Kalbar.

"Format pelaporan melalui SMS Center itu sangat mudah. Ketik Nama pelapor*Nomor KTP*Nama Sekolah*Isi Laporan. Kemudian kirim ke Â 0816-383-245," paparnya.

Selain melalui SMS Center, masyarakat juga dapat menyampaikan laporan kepada Ombudsman melalui telepon di nomor:0561-813737 atau datang langsung ke Kantor Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Barat di Jalan Surya Nomor 2A, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak.

Agus berharap Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se - Kalimantan Barat dapat menyelenggarakan PPDB yang adil, transparan dan akuntabel.

"Semoga pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2018/2019 tidak terjadi praktek-praktek maladministrasi seperti pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, diskriminasi dan lain-lain," harapnya.

Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Barat akan melakukan rapat koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Kanwil Kementerian Agama Kalbar dan beberapa Kepala Dinas Pendidikan di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat untuk bersama-sama membuat komitmen mengawal pelaksanaan PPDB agar berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, non diskriminatif dan berkeadilan.

Â "Hal ini demi peningkatan akses layanan pendidikan," tukasnya.